

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KERAJINAN SONGKOK RECCA MELALUI PEMBINAAN LANGSUNG OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BONE

Andi Muhammad Aidil Fitra R
NPP. 30.1171

Asal Pendaftaran Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Am.aidilfr27@gmail.com

Pembimbing Skripsi Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of this research is motivated by the implementation of regional autonomy to maximize development throughout the country. In carrying out one of the government's functions, which is empowerment, the local government is responsible for implementing regional autonomy in autonomous regions, including in empowering small and medium-sized enterprises in the Recca songkok craft. Furthermore, the researchers are interested in studying how empowerment is carried out by the Bone Regency Local Government, specifically the Cooperative and Small and Medium Enterprises Agency, towards Recca Songkok. **Purpose:** The purpose of this research is to collect data and analyze it to obtain results that can provide an overview of the empowerment of MSMEs in Recca Songkok Craft by the Department of Cooperatives and MSMEs of Bone District, explain the factors that hinder the process, and the efforts made to overcome these obstacles. **Method:** The research design used in this study is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques used three methods, namely interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed starting from data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research was conducted in Bone District. **Result:** From the results of this research, it can be concluded that the empowerment of MSMEs in Recca Songkok Craft through direct coaching by the Department of Cooperatives and MSMEs has been implemented. **Conclusion:** However, there are still obstacles in the implementation of the program. Therefore, the researcher suggests continuing to maximize the community empowerment process by providing facilities and infrastructure, as well as maintaining consistency in its implementation.

Keywords: Bone District, Empowerment, Local Government, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Recca Songkok,

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Adanya pelaksanaan otonomi daerah untuk memaksimalkan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan, pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah di daerah otonom, termasuk dalam pemberdayaan terhadap UMKM kerajinan songkok recca. **Tujuan:** Selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada UMKM Songkok Recca. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM kerajinan songkok recca melalui pembinaan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah terlaksana. **Kesimpulan:** Namun, masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran untuk terus memaksimalkan proses pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta untuk tetap terus konsisten dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kabupaten Bone, Pemberdayaan, UMKM, Songkok Recca, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di seluruh pelosok negeri, dengan kaitannya bahwa otonomi daerah meliputi hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri dengan mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah otonom, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pemerintah memiliki fungsi yang disebutkan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2011:32) bahwa “fungsi pemerintahan dibagi atas 4 (empat) yaitu pelayanan publik (public services), pemberdayaan (empowerment), pengaturan (regulation), dan pembangunan (development)”. Pemerintah terus melakukan upaya serius untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dengan memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia sangat bergantung pada peran yang dimainkan oleh UMKM. Tumbuh dan berkembangnya UMKM dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dapat memperluas lapangan kerja serta memberikan layanan ekonomi yang luas ke masyarakat, sehingga berperan kedalam proses pemerataan serta peningkatan angka pendapatan masyarakat secara signifikan. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan data yang di peroleh pada tahun 2020, kurang lebih terdapat 50 juta UMKM pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 67 juta yang menandakan bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi ril yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian di Indonesia.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah UMKM sebanyak 13.000, pelaku UMKM berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone pada tahun 2022. UMKM tersebut dengan berbagai jenis usaha seperti kerajinan tangan, makanan, hingga fashion. Dari berbagai jenis usaha yang ada, salah satu yang terkenal dan banyak digemari adalah produksi kerajinan songkok recca khas Kabupaten Bone yang dibuat langsung oleh masyarakat asli di Kabupaten Bone dengan berbagai keindahan dan keunikan tersendiri yang tidak kalah dengan kerajinan lainnya. Produksi songkok recca khas Kabupaten Bone sampai sekarang masih terus dilakukan oleh beberapa komunitas dan pelaku usaha kerajinan songkok recca di Kabupaten Bone. Seiring berjalannya waktu, songkok recca khas Kabupaten Bone mengalami berbagai macam kendala dan masalah yang mengakibatkan produksi songkok recca ini menurun, sehingga para perajin songkok recca mengeluh dan meminta pemerintah untuk bisa membantu usaha ini.

Pemerintah Kabupaten Bone terus melakukan upaya agar bisa terus mengembangkan produksi songkok recca khas Kabupaten Bone untuk memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha kerajinan songkok recca. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone khususnya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone dengan meneyeenggarakan pemberdayaan UMKM songkok recca melalui melaksanakan pembinaan secara langsung. Pemberdayaan UMKM songkok recca ini diharapkan mampu membantu para pelaku usaha songkok recca di Kabupaten Bone untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya sehingga, menjadi kekuatan perekonomian di Kabupaten Bone.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa pokok permasalahan yang terjadi dan merupakan dasar pelaksanaan penelitian ini untuk di laksanakan, yaitu adanya pelaksanaan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bone. Salah satu yang patut diapresiasi dan mendapatkan perhatian adalah UMKM mengingat UMKM merupakan sector ekonomi ril yang berperan penting terhadap pengembangan perekonomian. di Kabupaten Bone UMKM yang diminati adalah songkok recca karena merupakan khas Kabupaten Bone yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pengembangan UMKM songkok recca di Kabupaten Bone, yaitu kualitas SDM para pelaku usaha kerajinan songkok recca masih rendah khususnya dalam mencari jalan keluar dari suatu permasalahan, pelaku usaha yang kurang kompeten untuk bersaing dengan berbagai UMKM kerajinan lainnya masih kurang, serta kurangnya inovasi dan kreativitas pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks pengembangan maupun pemberdayaan. “Pemberdayaan UMKM Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali” (Ni et al., 2017): Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu, pemberdayaan UMKM melalui program binaan memberikan hasil yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM di Provinsi Bali. Kendala yang dialami oleh UMKM di Provinsi Bali pada tingkat hulu adalah modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku, dan pemasaran. Sedangkan pada tingkat hilir yaitu, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah khususnya dalam proses pemasaran.

“Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha” (Bahri et al., 2019): Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu, Pemberdayaan yang diinginkan oleh para pelaku usaha yaitu cenderung mengarah kepada peningkatan kualitas produk. Terdapat empat aspek yang menjadi masukan pelaku usaha diantaranya, program yang dilakukan sesuai dengan penerima manfaat, setiap program yang dilakukan diharapkan adanya tindak lanjut, program yang memudahkan akses informasi, dan program yang dilakukan seharusnya dapat tersosialisasi dengan baik.

“Pemberdayaan UMKM Melalui Program Kredit Uaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” (Febrianto, 2022): Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu, pemberdayaan UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan maksimal. Adapun masalah yang hadapi adalah UMKM yang masih tradisional, UMKM memilih untuk melakukan peminjaman di pihak lain, dan kredit bermasalah. Sedangkan solusi yang dilakukan pemerintah adalah mengubah pola pikir pengusaha, menerapkan bunga kredit yang rendah, dan membantu UMKM untuk berfokus pada kinerja produktivitasnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori dan lokus yang berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebito (2017:113) berdasarkan 4 indikator pemberdayaan yaitu, Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Serta lokus pada penelitian ini yaitu pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone, yang dalam hal ini melakukan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM kerajinan songkok recca khas Kabupaten Bone

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemberdayaan UMKM Songkok Recca oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone, Faktor-Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pemberdayaan UMKM kerajinan songkok recca oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM songkok recca oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone.

II. METODE

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diteliti, Sugiyono (2015:13) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif adapun pendekatan induktif menurut Creswel (2013:96) Pendekatan induktif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur yang lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dan untuk meminta pendapat dan ide-ide dari narasumber. Berikutnya yaitu observasi Marshall dalam Sugiyono (2013:226) menyatakan bahwa “through observation, the research learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Artinya bahwa pada teknik observasi peneliti mempelajari bagaimana perilaku dan makna sikap dari objek yang diobservasi. Pada Penelitian ini observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif yaitu pengumpulan data dengan mengamati objek interaksi langsung. Artinya dengan observasi partisipatif ini peneliti turut langsung berpartisipasi dengan melakukan pengamatan dan mendengarkan sehingga mengetahui kondisi internal yang terjadi dilapangan. Serta adapun dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data/dokumen yang telah ada. Apabila dibandingkan dengan metode lainnya, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang lebih sederhana.” Dokumentasi dapat berupa arsip-arsip, laporan tertulis maupun daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan informasi yang peneliti inginkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan UMKM Kerajinan Songkok Recca Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone

3.1.1 Tujuan

UMKM adalah usaha mandiri disemua sektor ekonomi yang mampu membuka kesempatan kerja dan memberikan pelayanan serta meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mencapai stabilitas nasional (amin, 2015:88). Sehingga, pelaksanaan pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Bone. Adapun Tujuan Pemberdayaan UMKM yaitu, untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Serta, untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dan kemiskinan.

3.1.2 Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UMKM merupakan salah satu urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan pilihan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, yang menyelenggarakan urusan pemerintah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, yaitu kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan berdasarkan tugas perbanutan dengan menggunakan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya pemerintah bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya hasil UMKM secara maksimal dalam rangka menambah pendapatan serta untuk mensejahterakan masyarakat (khususnya bagi para pelaku utama UMKM).

Demikian juga pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Bone untuk para pelaku UMKM kerajinan songkok recca khas Kabupaten Bone yaitu melalui pembinaan secara langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone, berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bagian Kelima, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dalam pemberdayaan usaha mikro itu sendiri mulai pengordinasian usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro, perlindungan usaha mikro, pelaksanaan monitoring, hingga evaluasi serta tugas lain yang diberikan terkait tugas dan fungsinya dengan tujuan menindaklanjuti pemberdayaan UMKM.

3.1.3 Program

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah pelaksanaan pemberdayaan melalui pembinaan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Harapannya dengan dilaksanakannya pembinaan ini dapat menambah pengetahuan pengelola UMKM songkok recca yang ada di Kabupaten Bone seperti memahami tupoksi nya masing-masing, dan mempertegas pengelolaan UMKM-nya secara administrasi.

3.2 Hambatan Pemberdayaan UMKM Kerajinan Songkok Recca

Dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak luput dari adanya kendala yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan seperti, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha akan perkembangan teknologi yang ada, dan sulitnya akses permodalan para pelaku usaha kerajinan songkok recca khususnya karena beberapa pelaku usaha tidak memenuhi syarat dalam memperoleh akses permodalan tersebut.

3.3 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Strategi Pengembangan BUMDes Alitta

Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberdayaan, maka ditetapkanlah beberapa Langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, dengan memberikan edukasi terkait penerapan penggunaan teknologi, serta memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha terkait peningkatan kualitas tata Kelola UMKM bagi para pelaku usaha kerajinan songkok recca.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adanya keterbatasan pengetahuan para pelaku usaha akan perkembangan teknologi menjadi hambatan pemerintah dalam memberdayakan para pelaku usaha kerajinan songkok recca di Kabupaten Bone. Hal ini dikarenakan seringkali pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pemberdayaan sedangkan beberapa diantara mereka kesulitan dalam mengaksesnya sehingga, dalam pelaksanaan pemberdayaan ini tidak berjalan efektif dan efisien padahal potensi perkembangan usaha mereka melalui teknologi sangat baik.

Adapun hambatan lain dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada para pelaku usaha kerajinan songkok recca yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah melalui fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kerajinan songkok recca yang diwujudkan melalui membantu memfasilitasi para pelaku usaha bekerjasama dengan bank pemerintah (BPD SulSelBar) seringkali mengalami hambatan berupa beberapa pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat meliputi:

- a. Tidak memiliki jaminan yang cukup
- b. Kurangnya catatan keuangan
- c. Rasio utang yang tinggi

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Bone untuk para pelaku UMKM kerajinan songkok recca khas Kabupaten Bone yaitu melalui pembinaan secara langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone, berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bagian Kelima, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dalam pemberdayaan usaha mikro itu sendiri mulai pengordinasian usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro, perlindungan usaha mikro, pelaksanaan monitoring, hingga evaluasi serta tugas lain yang diberikan terkait tugas dan fungsinya dengan tujuan menindaklanjuti pemberdayaan UMKM. Adanya keterbatasan pengetahuan para pelaku usaha akan perkembangan teknologi menjadi hambatan pemerintah dalam memberdayakan para pelaku usaha kerajinan songkok recca di Kabupaten Bone. Hal ini dikarenakan

seringkali pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pemberdayaan sedangkan beberapa diantara mereka kesulitan dalam mengaksesnya sehingga, dalam pelaksanaan pemberdayaan ini tidak berjalan efektif dan efisien padahal potensi perkembangan usaha mereka melalui teknologi sangat baik.

Adapun hambatan lain dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada para pelaku usaha kerajinan songkok recca yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah melalui fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kerajinan songkok recca yang diwujudkan melalui membantu memfasilitasi para pelaku usaha bekerjasama dengan bank pemerintah (BPD SulSelBar) seringkali mengalami hambatan berupa beberapa pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat meliputi:

- a. Tidak memiliki jaminan yang cukup
- b. Kurangnya catatan keuangan
- c. Rasio utang yang tinggi

Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberdayaan, maka ditetapkanlah beberapa Langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, dengan memberikan edukasi terkait penerapan penggunaan teknologi, serta memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha terkait peningkatan kualitas tata Kelola UMKM bagi para pelaku usaha kerajinan songkok recca.

Keterbatasan penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu dan jarak yang jauh serta akses jalan yang sulit ke lokasi penelitian terutama pada UMKM yang berada di kawasan Pedesaan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM kerajinan songkok recca melalui pembinaan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bone untuk menemukan hasil secara mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, para pelaku UMKM Songkok Recca, serta seluruh pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amin, N. A. (2015). *Kewirausahaan: Teori Praktik Dan Pemberdayaan*. Mataram: IPDN Kampus NTB.

Creswel, John. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. In *Research Design Qualitative Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R And D*. Bandung: Alfabeta (Vol. 3, Issue April).

Jurnal & Skripsi:

Bahri, A., Mulbar, U., Suliana, A., Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, L., Negeri Makassar Jalan Andi Pangerang Pettarani Gunung Sari Makassar, U., & Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Makassar Jalan Jenderal Ahmad Yani No, B. (2019). *Kajian Pemberdayaan Umkm Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha*. In *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar* (Vol. 1, Issue 1).

Febrianto, F. R. (2022). *Pemberdayaan UMKM Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Idris, M., & Marhaen Sakti, S. (2009). *Pengembangan Desain Keramik Seni Melalui Penerapan Ragam Hias Etnik Pada Kriya Keramik Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa* (Ceramic Design Development Through The Application Of Ethnic Decorative In Ceramic Art At Jipang Village Bontonompo District Gowa Regency)*.

Ni, O. :, Sunariani, N., Oka Suryadinatha, A., Idm, I., & Mahaputra, R. (2017). *Pemberdayaan UMKM Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2.